

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> KORAN KONTAN <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA	<input type="checkbox"/> SUARA KARYA <input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input checked="" type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST
---	---

KODE: LISTRIK MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI UMUM
 MIGAS GEOLOGI PANSUS ANGKET
 ENERGI ALTERNATIF

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV **DES**
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 HALAMAN: 11 TAHUN 200

RUU Minerba Disahkan Seminggu Lagi

[JAKARTA] Pengesahan Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu bara (RUU Minerba) pengganti Undang-Undang Pertambangan masih tertunda. Penundaan itu masih terganjal bentuk usaha pertambangan apakah menggunakan izin usaha pertambangan atau perjanjian usaha pertambangan.

Dirjen Mineral, Panas Bumi dan Batu Bara, Bambang Setiawan menuturkan, pemerintah mengharapkan RUU Minerba selesai bulan ini dan kemungkinan besar akan disahkan melalui paripurna.

"Masih banyak yang harus dijabarkan, butuh waktu satu minggu untuk finalisasi," ujar anggota Pansus RUU Minerba Faksi PDI-P, Sony Keraf di Jakarta, Senin (1/12).

Terdapat variasi sikap menyangkut, apakah cukup dengan perizinan atau perlu juga perjanjian untuk pertambangan skala besar dan bersifat strategis. Beberapa fraksi meminta satu rezim usaha pertambangan.

Anggota Pansus dari Fraksi PAN, Alvin Lie menuturkan, belum jelas

bentuk usaha pertambangan, terutama terkait perjanjian usaha pertambangan. Masa peralihan juga menjadi pembahasan yang intensif di dalam Pansus Minerba.

Belum ada kesepakatan, apakah kontrak karya yang diterbitkan sebelum UU Minerba diberlakukan dapat ditinjau kembali atau tidak.

"Prinsipnya, jika menggunakan perizinan semuanya harus menggunakan bentuk usaha perizinan tidak boleh ada pengecualian. Kontrak karya lama dengan masa berlaku 10 tahun bisa dihormati, tetapi yang lebih dari 40 tahun harus disesuaikan," katanya.

Skema perizinan kedudukan negara dalam perjanjian lebih kuat. Wilayah pertambangan yang berada di kabupaten, izin usaha dikeluarkan oleh bupati, lintas kabupaten dikeluarkan oleh gubernur, dan izin usaha lintas provinsi dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Sedangkan, perjanjian usaha pertambangan seluruhnya dikeluarkan oleh pemerintah pusat diwakili oleh badan pengatur pertambangan. [DLS/N-6]

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

- KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI
 GEOLOGI

- UMUM
 PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 14

TAHUN 200

Antam ups stake in alumina project

JAKARTA: PT Aneka Tambang, Indonesia's second largest publicly listed metal producer, raised its stake in a chemical-grade alumina project to 65 percent from 49 percent.

Aneka Tambang agreed in August to buy STAR Resources's 15 percent stake in PT Indonesia Chemical Alumina for US\$450,000 and a further 1 percent from Showa Denko KK for \$30,000, Corporate Secretary Bimo Budi Satriyo said Tuesday by phone.

Antam, as the company is known, received approval on Oct. 30 from the Justice and Human Rights Ministry to change the company's charter because of the new ownership structure, he said. — *Bloomberg*

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input checked="" type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST
---	--

KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input checked="" type="checkbox"/> MINERAL. BATU BARA DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> GEOLOGI	<input type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> PANSUS ANGKET
--	--	---

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	(DES)																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
HALAMAN: 161											TAHUN 20																		

Rio Tinto, RI regions agree mine conditions

Rio Tinto Group, the world's third largest mining company, has reached an agreement with regional administrations in Indonesia for a US\$2 billion nickel mine, moving closer to a final contract with the central government.

"The talks between Rio and the regional governments have concluded," including agreement on proposed tax payments and community development programs, said Bambang Setiawan, director general of coal and mineral resources at the energy ministry. Budi Irianto, Rio's spokesman, didn't answer mobile calls.

The mine in Central Sulawesi could start producing 46,000 metric tons a year by 2015 with the potential to expand to 100,000 tons, the Melbourne-based company said on May 28. Rio said in August the project may cost up to \$2 billion.

Rio is awaiting confirmation from the Forestry Ministry that will be no change in "forest classification" of the mining area, Setiawan said by phone. A change in the status may later make it illegal for Rio to extract minerals in the area.

The government and Rio, which are still negotiating royalty payments, will submit the draft of the so-called contract of work to parliament for approval after the forestry ministry's response, Setiawan said. The contract of work will cover taxes, royalties and labor contracts. — *Bloomberg*

HUBUNGAN MASYARAKAT
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV **DES**
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN 2

TAHUN 2008

DPR Mungkin Voting Soal RUU Minerba

JAKARTA. Sudah tiga tahun berjalan, Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara (RUU Minerba) ternyata masih belum beres juga. Saking alotnya, Panitia Khusus DPR RUU Minerba bahkan berencana melakukan pemungutan suara alias *voting* untuk memecah pasal-pasal yang diperdebatkan.

Sejatinya, Panitia Khusus DPR RUU Minerba ini akan melakukan *voting* pada Senin (1/12) lalu. Namun, proses tersebut akhirnya batal. Hingga kini belum ada kepastian kapan *voting* itu akan berlangsung.

Biang kerok masalah ini adalah soal bentuk konsesi usaha pertambangan. Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) bersikukuh tetap mempertahankan pemberian konsesi dalam bentuk Perjanjian Usaha Pertambangan (PUP).

Ketua Panitia Khusus RUU Minerba Agusman Effendi yang juga anggota Fraksi Partai Golkar mengatakan, PUP merupakan bentuk perlindungan terhadap konservasi cadangan kekayaan alam.

Cuma, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tak setuju. Anggota Pansus Sonny Keraf menilai PUP yang merupakan bentuk lain dari kontrak karya yang seharusnya dihilangkan dan diganti dengan sistem perizinan usaha pertambangan.

Menurut Sonny, pemerintah dan masyarakat sebagai penguasa sumber daya alam bisa memiliki kekuatan yang lebih ketimbang PUP atau kontrak karya. Namun, dia menilai pemberian izin ini bukan berarti pemerintah bisa sewenang-wenang mencabut izin. "Kami juga mempunyai rambu dan ketentuan yang tidak bisa dilanggar," katanya, Selasa (2/12).

Ketua Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad sepakat dengan Sonny. Dia menilai pemberian konsesi dalam bentuk PUP atau kontrak akan membuat posisi pemerintah lemah. "Kontraktor akan cenderung mendikte pemerintah dan eksploitatif," katanya.

Dian P Saraswati

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI
 GEOLOGI

UMUM
 PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 20

TAHUN 2008

Investor Berminat Tanam Uang di Bungo

JAKARTA. Kabupaten Bungo, Jambi, bagai gadis pujaan. Banyak investor tertarik membe-namkan duitnya di kabupaten yang memiliki banyak kekayaan sumber daya alam.

Sebut saja investor dari Thai-land, China dan Korea Selatan. Para investor ini terpicat dengan potensi kekayaan daerah kabu-paten yang terletak di sebelah barat Jambi ini.

Bupati Bungo Zulfikar Ahmad mengatakan, sejumlah pengusa-ha dari Thailand dan Korea Sela-tan akan membangun Pembang-kit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dalam waktu dekat. Ini karena Kabupaten Bungo ini menyim-pan cadangan batubara yang cukup besar dengan kadar kalori berkisar 5.000 kilo kalori (kkal) hingga 7.000 kkal.

Yang baru diketahui, cadang-an batubara ini tersebar di tiga kecamatan yakni Kecamatan Rantau Pandan sebesar 30,02 juta ton, Kecamatan Jujuhan sekitar 113,55 juta ton dan Keca-matan Muara Bungo sebanyak 9,75 juta ton.

Selain batubara, Kabupaten Bungo masih menyimpan potensi lainnya seperti emas, pasir kwarsa, batu suiseki dan logam lainnya. Dari sektor perkebun-an, Kabupaten Bungo memiliki lahan kelapa sawit dan karet yang cukup luas.

Untuk meningkatkan masuknya investasi, Pemerintah Kabu-paten (Pemkab) Bungo telah membangun semua infrastruk-tur jalan dan jembatan hingga pelosok desa. Zulfikar menegaskan, jalan-jalan produksi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di pedesaan sebagian

besar sudah mulus.

Saat ini, Pemkab Bungo juga sedang merintis pembangunan bandara yang bisa didarati pesa-wat berbadan lebar, termasuk fasilitas hotel-hotel berbintang. Pembangunan Bandara Bungo itu sudah mulai dirintis sejak 2006 lalu. Pemkab sudah mem-bebaskan lahan untuk bandara itu. Untuk mendukung sumber daya manusia yang handal dan memadai, Pemkab juga sudah mendirikan Universitas Negeri Bungo.

Selain upaya tersebut, Pem-kab Bungo juga berusaha meningkatkan kondisi keamanan dan iklim usaha di daerahnya.

**Selain batubara,
Kabupaten Bungo
masih menyimpan
emas, pasir
kwarsa, suiseki
dan logam lainnya.**

"Jangan coba-coba ada preman mengganggu pengusaha di Bu-ngo, akan berhadapan dengan saya," ancam Zulfikar.

Sejatinya, Kabupaten Bungo dulu memang terkesan kurang aman akibatnya sepinya aktivi-tas bisnis di kabupaten ini. Na-mun, sekarang, kabupaten selu-as 7.160 kilometer persegi ini sudah mengalami perkembang-an yang pesat. Zulfikar berharap Kabupaten Bungo bisa menjadi tujuan investasi utama di Jambi dengan langkah-langkahnya ini.

Edy Can, Antara

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

- KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI
 GEOLOGI

- UMUM
 PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES

1 2 ③ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 23

TAHUN 200

PENAMBANGAN

**Lokasi Tambang Emas
Bombana Akan Dikosongkan**

BOMBANA, KOMPAS — Lokasi penambangan emas di bantaran sungai dan perbukitan di Desa Wumbubangka, Kecamatan Raroatu Utara, dan Desa Rau-Rau, Kecamatan Raroatu, akan segera dikosongkan. Para penambang akan dikeluarkan karena merusak lingkungan Daerah Aliran Sungai Langkowala dan Tahi Ite, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara.

Bupati Bombana Atikurahaman, Selasa (2/12) di lokasi penambangan dekat Sungai Langkowala, mengatakan, para penambang telah merusak lingkungan. Padahal, perbukitan itu memasok air tanah untuk Kabupaten Bombana dan Konawe Selatan. Jika penambangan itu dibiarkan, bisa menyebabkan banjir di dua kabupaten tersebut.

"Izin penambangan rakyat akan kami evaluasi karena merusak lingkungan. Dalam satu dua bulan ini lokasi penambangan akan kami kosongkan," katanya.

Penambangan emas dipertimbangkan untuk dialihkan ke investor yang bisa melaksanakan

rehabilitasi lahan pascapenambangan. Ada 11 investor yang mengajukan izin penambangan.

Saat ditertibkan oleh polisi, tentara, dan jajaran Pemkab Bombana, Selasa, para penambang sudah menyebar ke seantero perbukitan. Tenda-tenda penambang didirikan dalam kelompok-kelompok terpisah di atas bukit yang mengapit lembah Sungai Langkowala.

Para penambang mengatakan, mereka bisa menggali di bukit jika membayar Rp 60.000 per minggu kepada orang yang mengaku sebagai ahli waris tanah itu. Ada juga sistem bagi hasil, ahli waris tanah memperoleh 40 persen dari emas yang diperoleh.

"Orang yang mengaku ahli waris biasanya didampingi polisi, tentara, dan polisi pamong praja. Kami diteror dengan tembakan senapan," kata seorang penambang, Roniansyah, mengadu kepada Kepala Polres Bombana Ajun Komisaris Besar Yan Sultra yang ikut menertibkan.

Yan Sultra menyatakan akan menyelidiki hal itu. (ANG)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI
 GEOLOGI

UMUM
 PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV **DES**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 20

TAHUN 2008



Galian C

Sejumlah anggota polisi dari Polres Purwakarta memberi tanda *police line* pada sebuah kendaraan alat berat yang biasa digunakan untuk melakukan galian C pada saat penutupan galian tersebut di Kampung Margasari, Desa Cisalada, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta, Selasa (2/12). Galian seluas 1,5 hektare itu ditutup karena diduga menjadi penyebab terjadinya bencana banjir di daerah tersebut.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

- KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI
 GEOLOGI

- UMUM
 PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV **DES**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 1

TAHUN 2009

INDUSTRI BATUBARA NASIONAL, "QUO VADIS"? (BAGIAN 2 DARI TIGA TULISAN)

Peluang di Tengah Ironi

RESESI global memang sudah nyata di depan mata. Dus, gelombang tsunami krisis finansial mempertegas berakhirnya era bulan madu sejumlah komoditas utama pertambangan, termasuk batubara. Banderol si *emas hitam* ini terus meluncur turun. Terakhir, Newcastle Index mencatat harga batubara berada pada level US\$ 84 per ton (21/11).

Apa strategi pengusaha menyikapi rendahnya harga komoditas batubara saat ini? Bagaimana peta penguasaan batubara di Tanah Air? *Investor Daily* memaparkan berbagai persoalan yang membelit industri batubara dalam tiga tulisan pada edisi 2-4 Desember 2009.

Oleh Heriyono

Saat ini, Indonesia dikenal sebagai eksportir nomor wahid di dunia. Itu hasil kajian Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics (ABARE). ABARE mencatat, Indonesia memasok 25% kebutuhan batubara dunia. Posisi Indonesia di atas Australia, Afrika Selatan, Tiongkok, Kolombia, dan Afrika Selatan.

Lebih dari 65% atau 165 juta ton per tahun produksi batubara domestik diekspor. Selain ke Tiongkok dan India, batubara Indonesia diekspor ke sejumlah negara seperti Taiwan dan Korea Selatan. Pasokan 'emas hitam' ini pun diterima di sejumlah negara Uni Eropa.

10 Produsen Batubara Terbesar (Juta Ton)

PT Kaltim Prima Coal	36
PT Adaro Indonesia	35
PT Kideco Jaya Agung	19
PT Arutmin Indonesia	16,5
PT Berau Coal	11
PT Indominco Mandiri	10
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	9
PT Bayan Resources Tbk	6
PT Trubaindo Coal Mining	4,5
PT Bahari Cakrawala Sebuku	4

Sumber: Diolah Investor Daily

Berdasarkan perhitungan Badan Geologi, Departemen ESDM, pada 2005, sumber daya batubara Indonesia sekitar 61,36 miliar ton. Data paling mutakhir memperlihatkan, sumber daya

batubara nasional sekitar 90,45 miliar ton. Sumber daya itu tersebar di 19 provinsi. Saat ini, cadangan terbukti batubara hanya 5,3 miliar ton dan diprediksi habis dieksploitasi dalam tempo 26,5 tahun. "Sebanyak 83% cadangan batubara terbukti berada di Kalimantan," ujar Calvin KK Gurusinga, kepala Bidang Informasi Pusat Sumber Daya Geologi Badan Geologi.

Dirjen Minerabapabum DESDM Bambang Setiawan mengakui, potensi sumber daya batubara Indonesia cukup besar. Dari sekitar 90 miliar ton, yang secara keekonomian sudah layak ditambang sebesar 18 miliar ton.

► Bersambung ke hal 7

"Dengan asumsi produksi rata-rata 200 juta ton per tahun, cadangan ini akan habis dalam jangka waktu 90 tahun," kata dia.

Dibandingkan dengan minyak bumi dan gas bumi, menurut Bambang, rasio ini paling besar. Sebab, rasio cadangan minyak bumi terhadap produksi saat ini kurang dari 15 tahun dan gas bumi sekitar 60 tahun.

Setiap tahun, produksi batubara Indonesia selalu meningkat. Pada 2005, produksi batubara Indonesia mencapai 152,7 juta ton dengan komposisi penjualan untuk domestik sebanyak 42,5 juta ton dan ekspor Rp 106,2 juta ton. Setahun kemudian produksi naik menjadi 180,1 juta ton, 39,4 juta ton di antaranya untuk pasar domestik dan 129,5 juta ton untuk ekspor. "Tahun lalu, produksi batubara kita mencapai 178,9 juta ton, yakni 45,3 juta ton untuk domestik dan 139,9 juta ton diekspor," jelas Bambang.

Produksi batubara itu berasal dari 36 pemegang perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B), belum termasuk pemegang kuasa pertambangan (KP). Saat ini, terdapat sekitar 6.000 KP.

Hingga kini, PT Kaltim Prima Coal tercatat sebagai produsen batubara terbesar di Indonesia dengan produksi rata-rata 36 juta ton. (Lihat tabel)

Kendala Infrastruktur

Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia Jeffrey Mulyono berpendapat, dalam perdagangan batubara dunia, Indonesia memiliki per-

soalan krusial. Persoalan mendasar yang sedang dihadapi industri batubara saat ini berkisar pada lemahnya investasi eksplorasi dan eksploitasi batubara. Masalah lain adalah semakin tingginya biaya produksi, isu kepemilikan dan kompensasi lahan, dan terbatasnya jalur sungai dalam transportasi tongkang batubara.

Secara logistik, kekuatan Indonesia berada pada pola angkutan sungai. Hingga kini, angkutan sungai merupakan moda yang lebih kompetitif dibanding dengan moda kereta api ke pelabuhan angkut seperti yang dilakukan di Australia, Afrika Selatan, dan Kolombia.

Menurut Jeffrey, biaya angkut dengan menggunakan tongkang sekitar US\$ 0,015 per ton/km, sedangkan dengan menggunakan kereta api minimal sekitar US\$ 0,3-0,4 per ton-km. "Seharusnya, industri maritim kita dapat memanfaatkan pasar batubara untuk pengembangan armada angkutan batubara, baik untuk tipe tongkang dan *bulk-carrier*," jelas dia.

Jeffrey menambahkan, pengembangan *bulk-carrier* tipe *handymax* sebaiknya dapat dikonsentrasikan di dalam negeri. Sebab, kemampuan dan kapasitas riil galangan-galangan kapal di Surabaya, Jakarta, dan Batam dapat memenuhi kebutuhan itu.

Asing Menyerbu

Menariknya potensi batubara Tanah Air memancing minat investor asing. Sejumlah perusahaan pertambangan mancanegara, terutama Australia, India, dan Thailand beramai-ramai membidik potensi batubara, khususnya di Kalimantan.

Puluhan perusahaan India dan

Tiongkok juga berburu batubara di lahan pertambangan Indonesia. Mereka antara lain National Thermal Power Corp (NTPC), perusahaan listrik India Power Trading Company (PTC), Larsen & Turbo, Reliance, Agrawal Coal, dan Watien.

Menurut Jeffrey, India dan Tiongkok berlomba mencari sumber daya alam batubara karena besarnya cadangan di Indonesia. "Ada sekitar 15 perusahaan yang menyatakan minatnya," ujar dia.

India dan Tiongkok memiliki pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batubara berkalori rendah, sama dengan megaprojek PLTU 10 ribu MW di Indonesia.

Direktur Indonesia Coal Society Singgih Widagdo khawatir aksi korporasi asing di Indonesia akan mengganggu pasokan batubara domestik. "Dengan dukungan pemerintahnya, mereka berusaha mengakuisisi untuk mengamankan pasokan batubara," jelas Singgih.

Mereka mengincar KP-KP yang memiliki cadangan batubara tidak marginal dan luas konsesi cukup besar. "Akuisisi perusahaan tambang batubara lokal oleh asing ini mesti dikendalikan," kata Singgih.

Seorang pejabat eselon satu di Departemen ESDM membisikkan, KP di Indonesia tidak boleh dijual ke perusahaan asing. Perusahaan asing hanya boleh membeli produksi batubara dari KP atau perusahaan lokal. "Kalau ingin punya konsesi lahan maka harus berbentuk PKP2B. Atau KP ditransfer menjadi PKP2B," ujarnya.

Proses itu pun harus melalui persetujuan DPR. Masalahnya, pemerintah

tidak memiliki catatan laporan mengenai jumlah KP di daerah. Kondisi ini diperparah dengan maraknya perusahaan pelayaran asing yang menguasai pangsa pasar pengangkutan ekspor batubara Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pelayaran Nasional Oentoro Surya pernah mengatakan, perusahaan pelayaran nasional baru menguasai sekitar 10% pangsa angkutan ekspor batubara. Padahal, potensi pengangkutan ekspor batu bara sangat besar yakni mencapai 150 juta ton per tahun.

Penguasaan asing atas angkutan batu bara itu, lanjut Oentoro, disebabkan oleh perjanjian perdagangan ekspor impor yang kurang menguntungkan Indonesia. Sistem yang banyak digunakan adalah *freight on board*, saat pihak importir luar negeri menentukan moda pengangkutan. "Masih mengacu prinsip pembeli adalah raja," katanya.

Seharusnya, sistem yang digunakan adalah *cost and freight* sehingga eksportir Indonesia dapat menentukan moda pengangkutan. Jika masih ada keterbatasan kapal berbendera Indonesia, pengusaha pelayaran nasional bisa mencarter kapal asing. Sayangnya, pilihan sistem perdagangan internasional yang memihak pelayaran nasional itu tidak dapat dipaksakan.

Saat ini, industri batubara nasional juga terkerangkeng oleh banyaknya tambang ilegal. Setiap tahun, produksi batubara ilegal mencapai 20 juta ton. "Potensi kerugian negara setiap tahun ditaksir Rp 1,5 triliun," ujar Jeffrey Mulyono

Jumlah batubara ilegal, ungkap Jeffrey, dapat diketahui dari jumlah pengapalan batubara dari Indonesia. Hampir 90% atau sekitar 18 juta ton batubara ilegal tersebut dari Kalimantan Selatan. Mereka menjual batubara itu sekitar Rp 100 ribuan per ton. (dr)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST																																												
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> GEOLOGI	<input type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> PANSUS ANGKET																																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 8.33%;">JAN</td> <td style="width: 8.33%;">FEB</td> <td style="width: 8.33%;">MAR</td> <td style="width: 8.33%;">APR</td> <td style="width: 8.33%;">MEI</td> <td style="width: 8.33%;">JUN</td> <td style="width: 8.33%;">JUL</td> <td style="width: 8.33%;">AGST</td> <td style="width: 8.33%;">SEP</td> <td style="width: 8.33%;">OKT</td> <td style="width: 8.33%;">NOV</td> <td style="width: 8.33%; text-align: right;">(DES)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> <td>30</td> <td>31</td> </tr> </table>			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	(DES)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	(DES)																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31															
HALAMAN: 20											TAHUN 200																																		

Inco Akan Produksi Nikel Hidroksida

JAKARTA – PT International Nickel Indonesia Tbk (Inco) akan memproduksi nikel hidroksida di Pomalaa, Sulawesi Tengah. Inco saat ini mengkaji pembangunan fasilitas pengolahan pelindian dengan tekanan tinggi (*high pressure acid leach/HPAL*) untuk memproduksi nikel tersebut.

“Nikel hidroksida merupakan produk antara. Kami menargetkan bisa menghasilkan produksi nikel hidroksida sebanyak 30.000 metrik ton per tahun,” kata Direktur *Investor Relations* dan *Sekretaris* Perusahaan Indra Ginting dalam keterangan tertulis yang diterima *Investor Daily* di Jakarta, Selasa (2/12).

Indra mengatakan, untuk mengolah nikel hidroksida, pihaknya mempelajari kemungkinan membangun fasilitas pabrik pemurnian nikel di Bahodopi dengan kapasitas sekitar 30.000 metrik ton.

Di Bahodopi, perseroan merencanakan untuk menambang

bijih nikel saprolitik. Bijih nikel dari Bahodopi kemudian dicampur dengan bijih nikel dari Sorowako sebagai pasokan bahan baku untuk pabrik pengolahan *pyrometallurgical* yang telah ada saat ini di Sorowako.

Konsultasi Publik

Sementara itu, kemarin, Inco mengadakan konsultasi publik di Pomalaa dan Bahodopi sebagai bagian dari langkah awal dalam mempersiapkan studi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

Senior Vice President dan Chief Financial Officer Inco Claudio Bastos menjelaskan, sebagaimana dipersyaratkan kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Pomalaa, tahapan konsultasi publik ini diselenggarakan untuk memperoleh saran, pendapat, atau tanggapan dari masyarakat yang berkepentingan atas rencana pengembangan usaha perseroan. (her)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI
 GEOLOGI

UMUM
 PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 20

TAHUN 2008

BATUBARA

**PLN Butuh Batubara
35 Juta Ton**

JAKARTA – PT PLN membutuhkan batubara untuk kepentingan pembangkit listrik pada 2009 sebanyak 35 juta ton. Jumlah kebutuhan tersebut sudah memperhitungkan penambahan 4 juta ton pasokan batubara untuk proyek pembangkit listrik 10.000 megawatt (MW). Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar di Jakarta, Selasa (2/12), mengatakan, dibandingkan dengan proyeksi produksi batubara nasional tahun depan sekitar 250 juta ton, kebutuhan 35 juta ton tersebut mestinya bisa terpenuhi karena jumlahnya relatif kecil. Namun, pada saat harga batubara melonjak naik di kisaran US\$ 109 per ton pada Mei 2008 menyebabkan PLN kesulitan memasok batubara. Fahmi menegaskan, kebutuhan batubara untuk 2009 sudah diantisipasi dengan kontrak jangka panjang dengan pengusaha batubara domestik. Kebutuhan sekitar 35 juta ton tersebut akan dipasok seluruhnya dari perusahaan batubara domestik dengan mekanisme bisnis. **(c122)**